

ABSTRAK

Reformasi politik 1998 menuntut pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan mewujudkan *good governance*. Untuk itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP menyediakan informasi kinerja yang memuat dokumen perencanaan yang mengacu pada prinsip organisasi modern dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kekuatan pengendalian internal melalui peran APIP, komitmen organisasi, kompetensi SDM, dan penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap penerapan SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Penelitian kausal komparatif ini menggunakan data primer melalui kuesioner dan sampel dari metode sensus, serta data sekunder melalui laporan-laporan terkait. Data diolah menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) dan pengujian SEM menggunakan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pengendalian internal melalui peran APIP dan penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan, sedangkan komitmen organisasi dan kompetensi SDM berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penerapan SAKIP.

Kata Kunci: SAKIP, peran APIP, komitmen organisasi, kompetensi SDM, penerapan anggaran berbasis kinerja

ABSTRACT

The demand for performance accountability improvement from the public sector has increased since the political reform in 1998. As a form of fulfilling general orders for the accountability in the government performance, assessing the responsibility of local governments in Indonesia in providing public services and realizing good governance, the government issued a legal basis for Presidential Regulation Number 29 of 2014 regarding the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP). SAKIP is a system with a performance-based management approach (Performance-based Management) for performance information provision, which contains planning documents that refer to modern organizational principles with Government Agency Performance Accountability Reports (LAKIP) as a form of accountability. This study aims to examine and analyze the influence of internal control strength through the role of APIP, organizational commitment, the competence of HR, and the implementation of performance-based budgeting on the application of SAKIP in the Government of Kapuas Hulu Regency. This causal-comparative research utilizes primary data from questionnaires and samples using the census method and secondary data through topic-related reports. The data was processed using Structural Equation Modeling (SEM) analysis, and this SEM testing utilized SmartPLS software. The research results showed that the internal control strength through the role of APIP and the application of performance-based budgeting had a significant positive effect. In contrast, organizational commitment and HR competence had an insignificant positive impact on the implementation of SAKIP.

Keywords: *SAKIP, role of APIP, organizational commitment, HR competence, application of performance-based budgeting*

RINGKASAN

Semenjak reformasi politik tahun 1998 publik menuntut Pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah dan mewujudkan *good governance*. Untuk itu, Pemerintah menerbitkan suatu dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*Performance-base Management*) untuk penyediaan informasi kinerja yang memuat dokumen perencanaan yang mengacu pada prinsip-prinsip organisasi modern dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu harus mematuhi dan berkewajiban untuk melakukan penerapan SAKIP dan kemudian dievaluasi oleh Kementerian PANRB setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kekuatan pengendalian internal melalui peran APIP, komitmen organisasi, kompetensi SDM dan penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap penerapan SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Riset ini merupakan penelitian kausal komparatif. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah ASN yang mengerjakan penyusunan dan pelaporan SAKIP pada 27 OPD di Pemerintah Daerah Kapuas Hulu dimana masing-masing OPD diambil 2 orang. Sampel menggunakan metode sensus, dimana seluruh anggota populasi yang berjumlah 54 dijadikan sampel penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 – 2020. Data diolah dengan menggunakan analisis Structural Equation Modeling (SEM) dan pengujian SEM ini menggunakan software SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pengendalian internal melalui peran APIP dan penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan SAKIP sedangkan komitmen organisasi dan kompetensi SDM berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penerapan SAKIP. Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan

penerapan SAKIP di Kabupaten Kapuas Hulu dapat sehingga akhirnya target penilaian yang ingin dicapai atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dapat tercapai.